

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mempunyai arti kemauan bertindak atau kemampuan melakukan sesuatu, dan kemudian ada kata “berdaya” yang berasal dari kata “ber-daya” yang artinya berkekuatan atau berkemampuan, sedangkan pemberdayaan berasal dari kata “pember-daya-an” yang berarti suatu proses, cara atau perbuatan memberdayakan.¹ Pemberdayaan masyarakat bisa diartikan atau dipahami sebagai proses menswadayakan, memandirikan, mengembangkan, dan memperkuat posisi masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan penekanan di segala bidang dan sektor yang merubah kehidupan agar lebih sejahtera. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh daya atau kekuatan atau kemampuan dan proses pemberian daya atau kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²

Menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan atau mengartikan kata “pemberdayaan” dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menurut Nur Khoirin, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kelompok dalam

¹ KBBI Online, diakses pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 10.55 WIB. <https://kbbi.web.id/daya>.

²Dedy Wahyu Hernanda, “pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi” e-ISSN 2598-1064, 27.

kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu aksi, dan mengidentifikasi sasaran, oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan didalam komunitas yang sedang dibangun untuk bisa berdaya.³

- 2) Menurut Rasyid, berpendapat bahwa pemberdayaan adalah tugas pokok dari pemerintah, dan ada dua tugas lainnya yaitu pengaturan (*regulatory*) dan pelayanan (*service*).⁴
- 3) Menurut Soetomo, menyatakan bahwa pemberdayaan salah satu faktor dalam pembangunan adalah *power* (semangat) dalam dimensi generatif yang mempunyai potensi sangat penting untuk membantu masyarakat dalam membangun kelompok. Dalam sebuah kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain. Kelompok yang bersifat *powerless* akan memperoleh tambahan *power* atau *empowerment*, hanya dengan mengurangi *power* yang ada pada kelompok *powerholders*.⁵
- 4) Menurut Pricillia Azhani, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses yang terjadi antara individu dengan lingkungannya, adanya perubahan rasa tidak berdaya berubah pada penerimaan diri sebagai warga negara yang memiliki kemampuan sosial.⁶

³Nur Khoirin YD, dkk, *Pemberdayaan Petani Kebun Pisang di Lahan Kosong Sekitar Bandara Ahmad Yani Semarang* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 47.

⁴Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati" *Jurnal Bina Praja*, Vol.7 No.1 (2015): 68.

⁵Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). 88-89.

⁶Pricillia Azhani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Mangrove (Suatu Kajian di Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Pantai Timur Surabaya)" *Jurnal Bumi Lestari*, Vol.19 No.1 (2019): 21.

- 5) Menurut Jim Ife, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan kesempatan, pengetahuan, keterampilan dan penyediaan sumber daya bagi masyarakat untuk meningkatkan kepastian masyarakat, sehingga masyarakat bisa menemukan masa depan yang lebih sejahtera dan tentunya menjadi masyarakat yang berdaya.⁷
- 6) Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya yang berlandaskan kepada daya mereka sendiri, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, melalui upaya optimasi daya serta peningkatan posisi-tawar yang dimiliki, dengan perkataan lain, modal utama serta menghindari *rekayasa* pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat dengan cara pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat yang mempunyai posisi sebagai modal utama untuk memberdayakan masyarakat.⁸

Pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah proses membuat program pada suatu daerah atau wilayah yang perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan perekonomian dalam masyarakat dan program untuk menyejahterakan masyarakat yang mempunyai potensi pada sumber daya alam tapi belum bisa menggunakannya. Terwujudnya sebuah komunitas masyarakat yang berdaya dan mandiri yang mampu berperan sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan yang diarahkan sebagai tugas pemberdayaan sesungguhnya. Dengan pengertian lain, adalah dalam lingkungan masyarakat yang tidak

⁷Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam" *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.1 No.1 (2016): 60.

⁸Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 100.

berperan sebagai obyek dari pembangunan seperti yang terjadi selama ini, akan tetapi masyarakat mampu berperan sebagai subyek dalam pembangunan di desa untuk membangun desa agar lebih baik.⁹

Sedangkan dari kata masyarakat berarti sekelompok orang yang berinteraksi secara berkelanjutan, sehingga terdapat hubungan sosial yang terorganisasi dan terpola.¹⁰ Menurut Mulyana dari jurnal yang ditulis oleh Sutrisno menyatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam berinteraksi adalah individu yang berada dalam suatu unit masyarakat (kelompok), pemerintah, bangsa, perekonomian dan organisasi. Terikat dalam suatu ikatan solidaritas tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau rencana yang akan dicapai bersama, maka dari itu masing-masing individu memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan sendiri-sendiri dan disatukan dalam keputusan bersama.
- 2) Partisipasi dalam rasa suka rela dan kesadaran dari individu untuk ikut serta agar tidak melakukan sesuatu atas dasar kekuasaan pemimpin (formal) dan untuk menjalankan peran yang diberikan oleh kelompok secara ikhlas.
- 3) Partisipasi dalam proses pengelolaan suatu kegiatan (pengambilan keputusan bersama, pengarahan, sumber daya, pengawasan dan penyesuaian) dalam berkonotasi kepada keterlibatan anggota perorangan.¹¹

Masyarakat harus tahu posisi untuk menempatkan diri terhadap lingkungan yang akan dikelola lebih baik dan bisa membantu masyarakat

⁹Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati", 68.

¹⁰Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Antitesisnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 25.

¹¹Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati", 70.

untuk memperoleh kesuksesan dalam melakukan program pemberdayaan agar berjalan dengan lancar. Tentunya masyarakat harus tahu bagaimana cara merawat dan menjadi khalifah di Bumi, seperti yang dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خٰلِٖفَةً
 صَلَّى قَالُوْا اَنْتَ جَعَلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ
 نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ صَلَّى قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا
 تَعْلَمُوْنَ (۳۰)

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? “Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹²

Masyarakat yang lemah dan rentan adalah masyarakat yang harus dibantu dan diberdayakan, agar bisa menjadi masyarakat yang mandiri. Menurut Edi Suharto, ada beberapa masyarakat yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan dan lemah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan dalam pendidikan, kebutuhan dalam tempat tinggal, dan kebutuhan dalam kesehatan.
- 2) Masyarakat yang memiliki keterampilan akan tetapi belum bisa mengembangkan dan belum bisa menyalurkan bakatnya dalam bentuk kerajinan tangan maupun mengolah makanan.

¹²Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 30.

- 3) Masyarakat yang belum punya pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dalam keputusan-keputusan yang membuat masyarakat bimbang dalam proses pembangunan dan pemberdayaan dalam masyarakat.¹³

Selanjutnya, pengertian pemberdayaan masyarakat ada beberapa dari para ahli, menurut Prijono dan Pranaka dari jurnal yang ditulis oleh Wiwik dan M. Farid Ma'ruf menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi sekarang dalam artian tidak mampu melepaskan diri dari perangkap keterbelakangan dan kemiskinan.¹⁴

Menurut Munawar Noor, pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan.¹⁵ Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya, akan tetapi dengan menggunakan strategi alternatif pembangunan yang telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran untuk memberdayakan masyarakat.

Proses program pemberdayaan masyarakat, pastinya perlu didasari pemahaman bahwa akibat dari masyarakat yang tidak memiliki kekuatan itu karena muncul ketidak berdayanya masyarakat. Menurut Ife, ada beberapa jenis kekuatan masyarakat yang dapat

¹³Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), 58.

¹⁴Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban" *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol.4 No.7 (2016): 2.

¹⁵Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol.1 No.2 (2011): 88.

digunakan untuk menyukseskan program pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kekuatan dalam mengambil keputusan dan pilihan pribadi. Bertujuan untuk menentukan keputusan dan pilihan pribadi untuk bisa menjalankan hidup lebih baik lagi, oleh karena itu dalam pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat.
- 2) Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Karena pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara mengembangkan kemampuan masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kekuatan dalam menentukan kebutuhan apa saja yang harus dibutuhkan dalam masa pemberdayaan masyarakat. Perlunya pendamping dalam masa pemberdayaan masyarakat yang memberikan arahan tentang kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan yang sudah dirumuskan.
- 4) Kekuatan dalam kelembagaan. Dengan cara meningkatkan aksesibiliti masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keagamaan, keluarga, struktur pemerintah desa maupun pusat, dan sistem kesejahteraan sosial, karena itu adalah beberapa kekuatan dalam kelembagaan untuk melancarkan proses pemberdayaan masyarakat.
- 5) Kekuatan dalam sumber daya ekonomi. Karena pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengatur perekonomian desa agar bisa lebih baik lagi dan bisa membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan masyarakat tergantung atas pilihan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diharapkan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan dan bidang pendidikan. Salah satu tujuan

¹⁶Siti Hajar, dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018), 47-48.

pemberdayaan masyarakat yaitu untuk masyarakat yang memberdayakan dan menyadari potensi, kekuatan dan kemampuan yang ada pada diri sendiri guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan memperbaiki perekonomian masyarakat.¹⁷ Tujuan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk bisa mewujudkan impian dan meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan pendidikan (*better education*), yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, memperbaiki materi dalam seminar, memperbaiki metode dalam pemberdayaan, memperbaiki hubungan fasilitator dan penerima manfaat, serta memperbaiki yang menyangkut tempat dan waktu.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*), perbaikan yang paling utama tentang aksesibilitas dengan sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan, penyediaan produk dan peralatan lembaga pemasaran. Adapun salah satu tujuannya yaitu untuk tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup dan untuk memperbaiki aksesibilitasnya,
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*), yang bertujuan untuk memperbaiki tindakan-tindakan yang ada di masyarakat supaya semakin lebih baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*), yang bertujuan untuk memperbaiki kelembagaan dalam melakukan kegiatan proses pemberdayaan, yang diharapkan akan memperbaiki pengembangan jejaring kemitraan-usaha yang termasuk dalam perbaikan kelembagaan.

¹⁷Mubasyaroh, "Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Dimensi Pengembangan Masyarakat Islam", 60-61.

- 5) Perbaiki usaha (*better business*), yang bertujuan untuk memperbaiki aksesibilitas, kegiatan, kelembagaan, dan pendidikan, yang diharapkan akan memperbaiki usaha yang dilakukan.
- 6) Perbaiki lingkungan (*better environment*), yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan di lingkungan agar lebih terjaga dan lebih lestari, karena penyebab kemiskinan dan pendapatan terbatas itu karena kerusakan pada lingkungan yang sering terjadi di alam.
- 7) Perbaiki pendapatan (*better income*), yang bertujuan untuk memperbaiki pendapatan dalam perekonomian keluarga dan masyarakat, yang disebabkan oleh perekonomian yang sangat rendah.
- 8) Perbaiki masyarakat (*better community*), yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat lebih baik dan mewujudkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera.
- 9) Perbaiki kehidupan (*better living*), yang bertujuan untuk keadaan dalam kehidupan disetiap masyarakat dan keluarga.¹⁸

c. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut para ahli, ada salah satu yang bernama Tuwo Ambo menjelaskan tentang keterbatasan masyarakat dalam penguasaan ilmu teknologi, kelembagaan usaha dan modal yang menjadi penyebab kurangnya pemberdayaan masyarakat. Kalau masyarakat mengingatkan perubahan, maka pemberdayaan masyarakat harus melakukan lima pendekatan ini dengan mengamati secara teliti dan sungguh-sungguh harapan, pendapatan, kebutuhan, dan potensi sumber daya yang dimiliki masyarakat. Dapat dijelaskan ada lima pendekatan yaitu sebagai berikut:

¹⁸Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, 111-112.

- 1) Mengembangkan akses mata pencaharian alternatif yang harus dikembangkan, dilakukan dengan pertimbangan bahwa sumber daya manusia, sumber daya alam dan potensi yang ada di tempat yang akan diberdayakan.
- 2) Akses terhadap modal, dalam pemberdayaan masyarakat sangat memerlukan strategi, dan strategi itu berupa pengembangan akses modal. Strategi ini sangatlah penting karena pada dasarnya memperoleh modal sangatlah sulit.
- 3) Akses terhadap teknologi, masyarakat belum banyak yang bisa mengakses teknologi. Maka dari itu upaya-upaya peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi yaitu dengan cara mengenalkan teknologi pada masyarakat. Akan tetapi dengan adanya teknologi, maka merasa kesulitan untuk mengidentifikasi tipe dan jenis teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
- 4) Akses terhadap pasar, pasar merupakan salah satu kendala paling utama bila pasar tidak berkembang, jika ada faktor yang bisa dikatakan menghambat berkembangnya usaha. Karena itu cara untuk mengembangkan usaha yaitu dapat membuka akses pasar.
- 5) Pengembangan aksi kolektif, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama mempunyai arti sama dengan halnya pengembangan aksi kolektif.¹⁹

d. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat

Upaya yang harus dilakukan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat yaitu salah satu langkah pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan berakar kerakyatan, sehingga masyarakat yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, perlu adanya konsep perekonomian berjalan dengan

¹⁹Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban", 5-6.

lancar, maka aspirasi masyarakat harus tertuang dalam rumusan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat.²⁰ Maka dari itu, perlu adanya langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Adapun langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Memberikan penyadaran kepada seluruh masyarakat yang perlu diberdayakan melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- 2) Memberikan motivasi kepada masyarakat yang perlu diberdayakan.
- 3) Mengembangkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan keterampilan.
- 4) Membuat peluang usaha mandiri kepada masyarakat untuk memberikan jalan dalam penyaluran hasil produksi.²¹

e. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Mendorong lahirnya aktivitas lokal atau kegiatan-kegiatan di masyarakat merupakan kunci pertama dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat.²² Pemberdayaan masyarakat juga sebagai setrategi alternatif dalam pembangunan telah berkembang dalam literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya.²³ Maka dari itu, perlu adanya tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tahap yang lebih baik dan mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat dan pemerintah. Adapun tahap-tahap dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat dan membantu membuat program atau sebuah organisasi, sebagai berikut:

²⁰Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 89.

²¹Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 300.

²²Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam* (Tangerang Selatan: UIN Jakarta Press, 2013), 49.

²³Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 88.

- 1) Tahap persiapan, penyiapan tugas dan penentuan lokasi program adalah dua kegiatan yang perlu dilakukan pada tahap persiapan.
- 2) Tahap *assessment*, pada tahap ini yang dilakukan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh warga masyarakat, mengidentifikasi masalah yang terdapat di masyarakat dan kebutuhan yang dirasakan (*felt needs*).
- 3) Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, pada tahap ini untuk menyusun perencanaan dan menetapkan program-program kerja yang harus dilakukan, maka harus dilaksanakan pengelolaan program yang bertujuan untuk memfasilitasi warga masyarakat.
- 4) Tahap formulasi rencana aksi, tahap ini yang akan dilakukan adalah menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan kepada pihak penyandang dana yang akan diserahkan kepada agen perubahan yang membantu membimbing warga atau kelompok.
- 5) Tahap pelaksanaan program, tahap ini mengimplementasi program yaitu tahap yang penting dalam proses pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar.
- 6) Tahap evaluasi, tahap ini bertujuan untuk mengetahui suatu tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Tahap ini perlu dilakukan pada semua program pemberdayaan.
- 7) Tahap terminasi, tahap ini adalah tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahap terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya.²⁴

²⁴Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 10-11.

f. Teknik, Metode dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat mayoritas yaitu menggunakan metode praktek dan diselingi oleh teori yang sering kali disebut dengan teknik dan metode pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan masing-masing keterampilan yaitu akan disesuaikan dengan metode praktek yang dibutuhkan masyarakat. Metode praktek memang dinilai sangat efektif dalam pelaksanaan kegiatan yang akan diterapkan oleh masyarakat. Metode praktek memang sangat efektif dibandingkan metode ceramah yang hanya memberikan teori saja, karena masyarakat lebih mengerti dengan metode praktek.²⁵

Pemberdayaan masyarakat untuk menjangkau masyarakat luas perlu menggunakan teknik pendekatan lapangan, antara lain yaitu:

- 1) *Participatori Rural Appraisal* (PRA), teknik ini adalah metode-metode pengembangan masyarakat menjadi bagian dari metode RRA. *Participatori Rural Appraisal* adalah kelanjutan dari *Rapid Rural Appraisal*.
- 2) *Achievement Motivation Training* (ATM), adalah yang memberi latihan motivasi yang memperhatikan tiga aspek domain, yaitu *achievement*, *power*, dan *psikomotorik*, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.
- 3) *Action-Research* yaitu sebuah teknik untuk menyadarkan masyarakat terhadap masalah yang ada pada masyarakat dan untuk menyadarkan masyarakat terhadap potensi yang dimiliki.
- 4) *Participatory Action Research* yaitu teknik penyadaran masyarakat terhadap masalah dan potensi yang dimiliki untuk menekankan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan,

²⁵Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 301.

agar masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan.

- 5) *Why tree* dan *problem tree* adalah teknik evaluasi dan perencanaan yang digunakan dalam struktur analisis jaringan seperti pohon. Teknik ini antara lain *solution tree, problem tree*, dan sebagainya.²⁶

Terdapat beberapa metode pemberdayaan masyarakat partisipatif, antara lain sebagai berikut:

- 1) Metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas. Proses belajar intensif untuk memahami kondisi masyarakat yang dilakukan berulang-ulang dan cepat, menggunakan metode, cara dan pemilihan teknik tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masyarakat pada dasarnya merupakan metode RRA. Metode RRA dipusatkan pada pemahaman tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.
- 2) Metode *Participatory Rural Appraisal* (PRA), metode ini pada dasarnya merupakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan dengan memberikan tekanan pada partisipasi dengan prinsip dengan cara belajar dari masyarakat, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai perilaku, menghargai perbedaan, triangulasi, dan keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informal. Metode PRA dibangun berdasarkan penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris, kemampuan masyarakat setempat, dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam prosesnya.²⁷

²⁶Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 70.

²⁷Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 97.

- 3) Metode *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu suatu metode pengumpulan data atau diskusi kelompok yang terarah, pada dasarnya FGD adalah interaksi atau berbincang-bincang dengan individu-individu sekitar 10 sampai 30 orang yang tidak saling mengenal dan dipandu oleh seorang moderator yang bertujuan untuk mendiskusikan pengalaman dan pemahaman tentang sesuatu kegiatan atau program yang dicermati dan diikutinya.
- 4) Metode *Participatory Learning and Action* (PLA) atau proses praktek dan belajar secara partisipatif, metode PLA adalah bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai “*learning by doing*” atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA adalah proses belajar tentang suatu topik yang menjelaskan tentang metode pemberdayaan masyarakat. Dan segera diikuti dengan kegiatan riil atau aksi yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut.
- 5) Metode *Farmers Field School* (FFs) atau Sekolah Lapangan (SL), metode pemberdayaan masyarakat SL/FFs adalah kegiatan pertemuan yang didahului dengan membicarakan masalah yang sedang dialami, berbagi pengalaman, kemudian dilanjutkan dengan pengetahuan tentang penentuan cara-cara memecahan masalah dan dengan menggunakan alternatif yang paling efisien dan efektif sesuai dengan sumber daya yang dilakukan dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat.
- 6) Pelatihan Partisipatif, penelusuran tentang program pendidikan yang diperlukan atau penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus diawali dengan “*scoping*” dan analisis kebutuhan atau “*need assesment*”. Setelah itu menyusun kurikulum dan silabus yang diartikan sebagai acara atau program dalam pendidikan formal yang menjelaskan tentang pemberdayaan

masyarakat, pada setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat membuat lembar persiapan fasilitator atau perumusan modul.²⁸

Strategi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dan menjadikan masyarakat tahu tentang teknologi dengan menjaga sumber daya alam yang melimpah dan dengan cara mengagendakan program-program pelatihan, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam.

Menurut Florentina Ratih Wulandari, mengatakan strategi pemberdayaan masyarakat dapat memanfaatkan modal sosial masyarakat yang dikembangkan dengan cara strategi pembangunan, khususnya saling berkerja sama dan memiliki rasa keinginan untuk merubah masa depan bersama sehingga dapat mengoptimalkan kuantitas dan kualitas jaringan, inisiatif, komunikasi, kemampuan adaptasi, dan inovasi terhadap kelestarian lingkungan hayati serta perubahan lingkungan.²⁹

g. Peran Lembaga dan Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mulyana, partisipasi atau peran dari masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang diinginkan oleh masyarakat untuk mewujudkan rencana bersama dan kepentingan bersama. Adanya kesadaran dan kerelaan dari masyarakat untuk menjalankan peran dalam organisasi secara ikhlas.³⁰ Potensi yang ada dalam masyarakat harus dilibatkan pada program pemberdayaan masyarakat, maka dari itu selain adanya peran dari masyarakat perlu adanya peran dari lembaga dan peran pendamping dari

²⁸Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 71-72.

²⁹Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 301.

³⁰Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati", 70.

pemerintah. Beberapa peran lembaga dan pendamping, yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran pemerintah dalam artian aparat pemerintah harus mampu membangun partisipasi, dapat menyelaraskan dengan misi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah dan menciptakan *instrument* peraturan.
- 2) Organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- 3) *LocalCommunity Organization* (lembaga masyarakat yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri) seperti Karang Taruna, PKK, BPD dan sebagainya.
- 4) Koperasi berperan sebagai tempat perekonomian rakyat yang disebut juga sebagai organisasi yang membangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia dan organisasi sosial yang berwatak ekonomi.
- 5) Peran pendamping diperlukan untuk membantu dalam mengatasi keterbatasan masyarakat miskin dalam pengembangan kelompok dan dirinya.
- 6) *Bottom-up* berperan sebagai pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
- 7) Partisipasi masyarakat yang lebih ahli khususnya di bidang swasta dan usaha.³¹

h. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kegagalan dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan nilai-nilai normatif yang setidaknya diimplementasikan dalam kegiatan yang tidak berjalan. Karena adanya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaannya, banyak

³¹Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 97-98.

program pemberdayaan masyarakat yang tidak berdampak apa-apa. Pemberdayaan masyarakat ada beberapa nilai-nilai yang melandasi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejujuran (*Transparansi*), nilai ini secara empirik sangat penting dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena integritas moral semua yang terlibat dalam kegiatan yang berada pada ranah yang tinggi, nilai kejujuran harus melekat pada setiap insan-insan yang mengelola atau terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Keadilan, nilai ini berarti bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut memberikan peluang yang sama kepada seluruh kelompok sasaran baik dalam mendapatkan bantuan teknis maupun penguatan kepastiannya. Adil dan merata adalah nilai yang perlu ditanamkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Kepercayaan (*Trust*), nilai ini berarti bahwa pelaksana maupun kelompok sasaran yang akan diberdayakan dan dapat dipercaya untuk turut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Saling percaya antara keduanya juga penting dalam membangun kesepahaman dalam rangka mewujudkan keberhasilan dalam program tersebut. Kepercayaan ini sebagai mana diungkapkan Francis Fukuyama, yaitu nilai atau modal sosial yang dapat memperkuat perusahaan-perusahaan di Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan lainnya).
- 4) Kebersamaan dan saling tolong menolong, nilai ini berarti pemberdayaan masyarakat memerlukan kebersamaan dan saling tolong menolong dari mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat lainnya. Melalui kebersamaan kompleksitas dari kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat akan terasa mudah dan ringan untuk dilaksanakan.

- 5) Kepedulian, diartikan sebagai komitmen yang tinggi dari anggota masyarakat yang lain untuk secara sadar berbagai dengan anggota masyarakat yang lainnya. Berbagai dalam kaitannya dapat berupa material maupun inmaterial.
- 6) Berorientasi, dititikberatkan pada orientasi masa depan dalam program pengembangan masyarakat Islam, yaitu bagi pengembangan masyarakat di masa depan, apa saja yang dilaksanakan saat ini memiliki nilai kesinambungan pada masa depan.³²

Pemberdayaan masyarakat dengan terjalinnya kerja sama, adanya rasa percaya antar masyarakat dan adanya rasa tanggung jawab. Terjalinya kerja sama dan rasa tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang akan meningkatkan kualitas masyarakat. Maka akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi, setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.³³ Dengan adanya rasa tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat, maka perlu adanya prinsip-prinsip yang mendasari dari pemberdayaan masyarakat. Adapun beberapa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, antara lain yaitu:

- 1) Kebutuhan dan minat, yaitu pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada kebutuhan dan minat masyarakat. Mengetahui hal tersebut, apa saja yang menjadi minat dan kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan minat mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi lebih dahulu, serta kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi sesuai sumber daya.
- 2) Organisasi masyarakat bawah, yaitu pemberdayaan akan efektif jika mampu menyentuh atau melibatkan organisasi

³²Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 19-21.

³³Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 303.

masyarakat bawah, dari setiap kekerabatan atau keluarga.

- 3) Keragaman budaya, yaitu adanya keragaman budaya yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan. Budaya lokal yang beragam harus selalu disesuaikan dengan perencanaan pemberdayaan.
- 4) Perubahan budaya, yaitu pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan dengan hati-hati dan bijak agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya.
- 5) Belajar sambil bekerja, yaitu pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan.
- 6) Penggunaan metode yang sesuai, yaitu pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi, nilai sosial-budaya dengan sasarannya, dan kondisi lingkungan fisik.³⁴
- 7) Partisipasi, masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan gotong royong menjalankan pembangunan dan proses pengambilan keputusan pembangunan.
- 8) Keadilan dan kesetaraan gender, perempuan dan laki-laki mempunyai kesetaraan dalam menikmati secara adil serta bermanfaat dalam kegiatan pembangunan dan dalam perannya disetiap tahap pembangunan.
- 9) Demokratis, setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara mufakat dan musyawarah dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.³⁵

³⁴Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, 106-107.

³⁵Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 21-22.

- 10) Kepemimpinan, penyuluh atau pengembang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang hanya mampu mengembangkan kepemimpinan yang tidak bertujuan untuk kepuasan atau kepentingan sendiri. Dalam hal ini, penyuluh atau pengembang seharusnya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang bertujuan untuk memberikan arahan dalam kegiatan pemberdayaan yang ada.
- 11) Spesialis atau orang yang berpengalaman, fungsi sebagai penyuluh yaitu seseorang yang harus benar-benar pribadi yang telah mendapat latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai. Dalam hal ini, penyuluh atau pengembang yang harus disiapkan, dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan. Karena jika penyuluh atau pengembangnya yang disiapkan akan lebih efektif untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus.
- 12) Segenap keluarga, yaitu satu kesatuan dari unit sosial merupakan bagian dari penyuluh yang harus memperhatikan keluarga.
- 13) Kepuasan, yaitu pemberdayaan semestinya mampu merealisasikan tercapainya kapuasan. Biasanya kepuasan, dalam program-program pemberdayaan selanjutnya akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran.³⁶
- 14) Akuntabel dan Transparansi, masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung gugatkan baik secara moral, teknis, legal maupun *administrative*.
- 15) Keberlanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan

³⁶Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, 107-108.

peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini, tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.³⁷

i. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkut sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.³⁸

Menurut Shofwan dkk, kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai kebijakan strategi yang diharapkan mengembangkan harkat dan martabat masyarakat, mampu mensejajarkan diri dengan masyarakat lain dan diharapkan dapat membawa kemakmuran rakyat. Kebijakan diarahkan sebagai penerima manfaat terbesar dan dibangun berdasarkan asas partisipatif.³⁹ Berangkat dari konsep ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat secara tegas tertuang dalam GBHN Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam GBHN Tahun 1999, khususnya didalam “Arah Kebijakan Pembangunan Daerah” antara lain dinyatakan “mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga

³⁷Muhtadi dan Tantan Hermansah, *Manajemen Pengembangan*, 22.

³⁸Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, 89-90.

³⁹Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban”, 2.

ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah NKRI”.

- 2) Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain ditegaskan bahwa “hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkembangkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran serta masyarakat”.
- 3) Mencermati kedua rumusan Kebijakan Pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa “kebijakan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan otonomi daerah”.
- 4) Dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa “tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, meningkatkan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik”.
- 5) Dalam rangka mengemban tugas dalam bidang pemberdayaa masyarakat, Badan Pemberdayaan menetapkan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pemberdayaan masyarakat.⁴⁰

2. Pengembangan Ekowisata

a. Pengertian Pengembangan Ekowisata

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengembangan berasal dari kata “kembang” yang mempunyai arti tengah-tengah atau tidak maju, dan kemudian pengembangan berasal dari kata “pe-ngem-

⁴⁰Munawar Noor, “Pemberdayaan Masyarakat”, 90.

bang-an” yang berarti proses, cara, perbuatan mengembangkan.⁴¹ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata, ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.⁴²

Menurut Sri Wahyuni, pengertian dari ekowisata adalah konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan pemerintah setempat, dan memberi peluang bagi generasi muda sekarang dan yang akan datang untuk memanfaatkan dan mengembangkannya.⁴³ Ekowisata mulai mengarah pada pelestarian lingkungan dan ekologis yang sering disebut dengan ekowisata di era globalisasi, sehingga perlu digali dan dikembangkan guna menjadikan wisatawan sadar dan peduli akan lingkungan. Ekowisata di suatu daerah memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.⁴⁴

Sedangkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekowisata adalah proses kegiatan dalam mengembangkan wisata yang dilakukan oleh masyarakat disuatu daerah untuk

⁴¹KBBI Online, diakses pada tanggal 25 Desember 2019, pukul 14.15 WIB. <https://kbbi.web.id/kembang>.

⁴²Bambang Supriadi, “Pengembangan Ekowisata Daerah” dalam *Book Chapter Ekowisata*, ed Mochammad Nafi, dkk (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2017), 38.

⁴³Sri Wahyuni, dkk, “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya” *Diponegoro Journal Of Maquares*, Vol.4 No.4 (2015): 66.

⁴⁴Fikri Nazarullail, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata Lepen Adventure” *Jurnal Pendidikan*, Vol.2 No.8 (2017): 1071.

memenuhi kebutuhan dan membuat wisata menjadi terkenal. Sedangkan pengembangan ekowisata berdasar pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yaitu pembangunan kepariwisataan di Indonesia meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).⁴⁵

b. Tujuan Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk ikut bergabung kedalam pengelolaan ekowisata. Tujuan membuat ekowisata adalah agar orang-orang yang melakukan *ekoturisme* dan memiliki kesempatan untuk ikut terjun kedalam lingkungan alam dalam suatu cara yang tidak tersedia di lingkungan perkotaan.⁴⁶ Setelah adanya tujuan dari pembuatan program ekowisata, pasti adanya tujuan pengembangan ekowisata. Adapun beberapa tujuan pengembangan ekowisata, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya tarik wisata.
- 2) Mengkomunikasikan daya tarik wisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.
- 3) Mewujudkan dan menggerakkan perekonomian daerah.
- 4) Mengembangkan kelompok dan tata cara pengelolaan masyarakat dalam pariwisata yang mampu menggabungkan semua kepentingan.⁴⁷

⁴⁵Bambang Supriadi, "Pengembangan Ekowisata Daerah" dalam *Book Chapter Ekowisata*, 39.

⁴⁶Romy Luviana, "Penerapan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan" *Jom FISIP*, Vol.4 No.2 (2017): 13.

⁴⁷Bambang Supriadi, "Pengembangan Ekowisata Daerah" dalam *Book Chapter Ekowisata*, 40-41.

c. Strategi Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata adalah bagian dari kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata dapat diperoleh dengan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas alam sebagai bagian dari pembangunan kapasitas. Pengembangan ekowisata juga dilakukan secara sosial, ekonomi dan ekologi untuk berkelanjutan program ekowisata dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁸ Maka dari itu diperlukan beberapa strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari pengembangan ekowisata. Adapun beberapa alternatif strategi dalam pengembangan ekowisata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan konservasi dan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu program wisata, konsep ekowisata selalu mengedepankan konservasi didalamnya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran terhadap kerusakan lingkungan masih sering terjadi. Hal ini tidak hanya disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar tentang konsep ekowisata, tetapi peluang pengrusakan juga ada apabila tidak adanya sanksi atau pengawasan ketat dari pihak pengelola maupun pemerintah.
- 2) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat wisata, konsep pengembangan ekowisata salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga dapat bermanfaat untuk ekonomi masyarakat setempat. Adanya program-program pemberdayaan masyarakat yang ada, sudah sepatutnya semakin dikembangkan dan semakin diaktifkan. Selain itu, perlu dikembangkan lagi partisipasi masyarakat untuk

⁴⁸Pricillia Azhani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Mangrove (Suatu Kajian di Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Pantai Timur Surabaya)", 21.

menjadi pemandu wisata. Hal ini untuk menjembatani antara keinginan wisatawan dan konsep pengembangan ekowisata.⁴⁹ Dengan cara pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang efektif harus melibatkan semua lapisan dan golongan masyarakat, karena segala kebijakan dan program pemerintah tidak akan berjalan lancar implementasinya tanpa keterlibatan masyarakat.⁵⁰

- 3) Mempertegas penegakan hukum dan aturan untuk menjaga kelestarian lingkungan wisata, fungsi fisik adalah sebagai penyedia nutrisi, tempat pemijahan (*spawning ground*), tempat pengasuhan (*nursery ground*) dan tempat mencari makan (*feeding ground*) bagi fauna yang berasosiasi di lingkungan wilayah pesisir. Oleh karenanya, perlu dipertegas aturan atau hukum mengenai perlindungan atau konservasi di kawasan pesisir supaya tidak terjadi perusakan, penebangan bahkan pengalih fungsian lahan.
- 4) Penguatan konsep *ecotourism*, konsep *ecotourism* yang sesuai akan meminimalkan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan. Karena konsep ekowisata berorientasi pada keseimbangan antara wisata dengan kepentingan perlindungan sumber daya alam atau lingkungan dengan menggunakan sumber daya dan mengikut sertakan masyarakat lokal. Selain itu, kegiatan ekowisata ini sekaligus memberikan informasi lingkungan yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mencintai alam.⁵¹

⁴⁹Sri Wahyuni, dkk, “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya”, 69.

⁵⁰Dedy Wahyu Hernanda, “pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Banyuwangi”, 34.

⁵¹Sri Wahyuni, dkk, “Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut Surabaya”, 70.

d. Perencanaan Pengembangan Ekowisata

Pengembangan ekowisata diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Pengembangan ekowisata mulai mengarah pada pelestarian lingkungan dan ekologis yang sering disebut dengan ekowisata di era globalisasi, sehingga perlu digali dan dikembangkan gunanya untuk menjadikan wisatawan sadar dan peduli lingkungan. Pengembangan ekowisata di daerah memiliki banyak manfaat baik dari segi ekonomi, ekologi maupun sosial budaya.⁵² Untuk mencapai itu semua, maka harus mempunyai perencanaan pengembangan ekowisata. Adapun beberapa perencanaan pengembangan ekowisata, sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata dengan memperhatikan kebijakan ekowisata nasional.
- 2) Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan ekowisata sesuai dengan kewenangan daerah.
- 3) Memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekowisata dengan memperhatikan kebijakan nasional.
- 4) Mengintegrasikan dan memadukan rencana pengembangan ekowisata dengan rencana pengembangan ekowisata lainnya, rencana pengembangan ekowisata nasional dan rencana pengembangan ekowisata provinsi yang berbatasan.⁵³
- 5) Memperhatikan konservasi sumber daya alam, menjamin melibatkan masyarakat lokal, meningkatkan pengalaman, mencakup kegiatan-kegiatan yang bertanggung jawab dan mendorong usaha skala kecil yang produktif.

⁵²Fikri Nazarullail, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata Lepen Adventure", 1071.

⁵³Bambang Supriadi, "Pengembangan Ekowisata Daerah" dalam *Book Chapter Ekowisata*, 39-40.

Perencanaan harus komprehensif dan holistik dengan integrasi kompleksitas sistem pariwisata itu sendiri.⁵⁴

e. Prinsip-Prinsip Pengembangan Ekowisata

Prinsip pengelolaan ekowisata memiliki standar yang berupa kelestarian, fungsi ekosistem, kelestarian obyek daya tarik wisata alam, kelestarian sosial budaya, kepuasan pengunjung dan prinsip-prinsip yang bisa meningkatkan ekonomi. Pengembangan ekowisata harus berbasis masyarakat dalam upaya perbaikan kondisi lingkungan di kawasan ekowisata.⁵⁵ Adapun beberapa prinsip-prinsip pengembangan ekowisata, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berbasis pada alam, dimana kegiatan ekowisata yang dinikmati oleh para wisatawan adalah lingkungan sungai, goa dan pantai. Ketiga wilayah ini adalah tempat dimana wisatawan dapat berinteraksi secara langsung.
- 2) Keberlanjutan secara ekologis, dimana para wisatawan diajak untuk lebih mengenal alam dan juga menjaganya. Pengembangan ekowisata juga seringkali bersamaan dengan penanaman pohon bakau dan penebaran ikan. Hal ini menjadi nilai positif dari ekowisata yang menjadikan wisatawan untuk terlibat langsung dan untuk menjaga kelestarian alam.
- 3) Secara tidak langsung program ekowisata juga memberikan pendidikan dan wawasan yang luas kepada wisatawan tentang arti menjaga alam. Bentuk pembelajaran yang terjadi adalah secara informal, yaitu pemandu akan memberikan pemahaman secara singkat agar dapat dipahami oleh wisatawan.

⁵⁴Ferdinal Asmin, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai dari Konsep Sederhana* (Bogor: Bogor Agricultural University, 2018), 27.

⁵⁵Bambang Supriadi, "Pengembangan Ekowisata Daerah" dalam *Book Chapter Ekowisata*, 40.

- 4) Manfaat bagi masyarakat lokal juga sering dirasakan, dengan adanya banyak pengunjung maka sebagian masyarakat yang biasanya berkebun memiliki profesi tambahan sebagai pemandu wisata. Sedangkan para ibu rumah tangga juga memiliki peranan dalam mengelola jasa *homestay*. Setiap masyarakat diajak untuk terlibat langsung dalam mengelola jasa ekowisata. Secara tidak langsung, kedatangan pengunjung juga memberikan penghasilan ekonomi bagi masyarakat.
- 5) Menghasilkan kepuasan bagi wisatawan adalah kunci utama dari terlaksananya program ekowisata. Bentuk kepuasan yang berupa pendampingan dari proses awal tamu datang hingga tamu hendak berpamitan untuk kembali ke tempat asalnya. Keramahan yang diberikan oleh pemandu menjadi poin tersendiri dalam melayani pengunjung.⁵⁶

f. Pengembangan Ekowisata Mangrove di Wilayah Pesisir

Pemberdayaan masyarakat secara ekologis dan ekonomis sangat mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang memberikan fasilitas pada masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya, masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial secara berkelanjutan.⁵⁷ Itu semua telah direncanakan oleh pemerintah dalam wilayah perkotaan, pedesaan dan wilayah pesisir. Akan tetapi, yang sudah banyak diterapkan dan mempunyai potensi sangat bagus itu di wilayah pesisir, sedangkan wilayah pesisir adalah daerah yang sangat penting bagi kehidupan organisme laut.

⁵⁶Fikri Nazarullail, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata Lepen Adventure", 1075-1076.

⁵⁷Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", 88.

Wilayah pesisir juga mendukung dan melindungi bagian darat. Wilayah pesisir mempunyai banyak keanekaragaman biologi (*biodiversity*) tinggi dan produktif, mengalahkan perairan lain seperti laut terbuka.⁵⁸ Oleh karena itu, wilayah pesisir mendapatkan tekanan untuk mengaplikasikan dan meningkatkan kualitas ekosistem, seperti penangkapan ikan, pengumpulan bahan-bahan bangunan dan sumber daya mineral, menjadi tempat pemukiman, sebagai tambak ikan, sebagai tempat penampungan limbah dan sebagai pengembangan ekowisata.

Cara untuk meminimalisir dampak yang lebih besar lagi terhadap tekanan sumber daya alam yang ada di wilayah pesisir, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat pesisir yang dilakukan secara intensif, sehingga dapat menjadikan masyarakat sebagai komponen utama penggerak partisipatif dalam pengembangan sumber daya alam di wilayah pesisir. Begitupula sebaliknya, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peranan sumber daya alam dapat menyebabkan semakin menurunnya daya dukung lingkungan sumber daya pesisir dan kualitas hidup komunitas penduduk setempat.⁵⁹ Maka dari itu perlu ada pengembang dan pemerintah untuk memberikan arahan dan memberikan dukungan kepada masyarakat untuk bisa kreatif dalam mengembangkan wilayah pesisir.

Pernah pada tahun 1970-an, produksi perikanan laut yang ditangkap sebanyak 90% berasal dari perairan pesisir. Hal ini tidak mengherankan karena *fishing ground* di wilayah pesisir berkaitan dengan perairan dangkal, dimana ekosistem pesisir produktif tinggi dijumpai seperti lagoon, mangrove, padang lamun dan *coral reef* memainkan peranan penting

⁵⁸La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Gagasan Memelihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa* (Bandung: Alfabeta, 2014), 31.

⁵⁹Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati", 64.

dalam mendukung sistem kebutuhan perikanan (seperti tempat makan, tempat memijah dan habitat pembesaran).⁶⁰ Dari berbagai ekosistem tersebut masyarakat Indonesia khususnya yang mempunyai wilayah pesisir yang paling banyak, harus menggunakan strategi untuk bisa memanfaatkan ekosistem yang ada di wilayah pesisir dengan program ekowisata, agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang miskin. Strategi itu sangatlah cocok untuk digunakan di wilayah pesisir, karena daerah pesisir terutama yang mempunyai tanah berlumpur itu sangat cocok untuk membuat program seperti itu, dengan adanya program menanami mangrove bisa membantu perekonomian desa.

Pengembangan ekowisata saat ini di Indonesia, paling banyak dikembangkan ekowisata mangrove. Sedangkan pengertian dari mangrove adalah salah satu ekosistem hutan tropis yang memiliki karakteristik yang khas, dan juga salah satu ekosistem yang penting di daerah pesisir. Hutan mangrove merupakan sebagian besar hidup dan berkembang di kawasan pesisir secara ekologi dapat berfungsi sebagai perangkap sedimen (*sedimen trap*), pelindung pantai dari badai dan abrasi, sebagai habitat alami dan perlindungan bagi jenis ikan tertentu.⁶¹ Oleh sebab itu, pemerintah membuat tindakan pembangunan dan pengelolaan hutan mangrove di wilayah pesisir untuk memberdayakan masyarakat pesisir yang perlu diarahkan untuk tercapainya indikator pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan ekowisata mangrove di wilayah pesisir. indikator yang harus dicapai dan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya kelompok masyarakat pengelola mangrove yang berwawasan tentang lingkungan.

⁶⁰La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, 31-32.

⁶¹Romy Luviana, "Penerapan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan", 2.

- 2) Meningkatkan nilai tambah tentang ekosistem mangrove melalui lingkungan yang bersih dari sampah.
- 3) Meningkatkan individu atau kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan penyelamat mangrove.
- 4) Menurunnya degradasi kawasan mangrove.⁶²

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekowisata

a. Faktor Penghambat

Pemberdayaan masyarakat tentunya tidak pernah terlepas dari faktor pengambat dan pendukung. Sedangkan yang pertama, faktor penghambat dalam program pengembangan ekowisata melalui pemberdayaan masyarakat adalah belum bisa optimal karena sumber daya manusia yang belum siap. Masyarakat masih memiliki rasa ragu untuk mengembangkannya dan belum bisa mengembangkan program tersebut. Dalam penjelasan tersebut menjadikan salah satu faktor penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebab tanpa adanya kekuatan masyarakat untuk berkembang, maka dari itu masyarakat tidak akan mampu dan tidak akan berhasil dalam meningkatkan perekonomian hidupnya.⁶³ Permasalahan utamanya merupakan kualitas sumber daya manusia, kurangnya modal, kerusakan habitat laut dan pemahaman terhadap nilai-nilai sumber daya dan masalah kelembagaan.⁶⁴

Faktor penghambat yang kedua yaitu pendapat dari masyarakat yang berbeda dan beragam karakter dari masyarakat. Pemikiran dan karakter anggota dalam organisasi yang berbeda-beda, maka dari itu merupakan penghambat dalam rasa egois, rasa malas,

⁶²La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, 91.

⁶³Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 303.

⁶⁴Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban", 3.

dan perkembangan kelompok yang masih terkadang ditemui dalam diri setiap anggota kelompok, kemudian kegiatan organisasi yang kurang partisipasi aktif dari anggotanya.⁶⁵ Kurangnya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengaturan dan pelayanan, kelembagaan struktur dan stratifikasi, budaya lokal, kepemimpinan, sarana dan prasarana.⁶⁶

Faktor penghambat yang ketiga yaitu pemahaman masyarakat tentang pengembangan ekowisata yang masih rendah. Jika masyarakatnya sendiri tidak mempunyai keberanian atau kemauan untuk mengembangkan ekowisata, maka dari itu pemahaman masyarakat desa juga tidak akan berkembang. Dan rendahnya rasa ingin tahu masyarakat untuk berkembang dan berhasil, maka dari itu menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁶⁷ Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peranan ekowisata yang menyebabkan semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.⁶⁸

b. Faktor Pendukung

Selain faktor pengambat, adanya faktor pendukung dalam melaksanakan pengembangan ekowisata melalui pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang pertama yaitu masyarakat memiliki rasa dan kemauan untuk maju menjadi desa yang lebih mandiri. Meskipun masih ditemukan masyarakat yang belum mempunyai kemauan untuk memajukan kualitas hidupnya dan belum berani untuk mengembangkan potensi yang ada di desa

⁶⁵Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 303-304.

⁶⁶Fikri Nazarullail, dkk, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Ekowisata Lepen Adventure", 1072.

⁶⁷Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 304.

⁶⁸Sutrisno, "Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengembangan Tanaman Mangrove di Kabupaten Pati", 64.

pesisir, sedangkan masih banyak pula masyarakat yang mempunyai kemauan untuk maju.⁶⁹ Maka dari itu, perlu adanya dorongan atau motivasi individu dari pemerintah agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan hidupnya.⁷⁰ Dalam hal ini, terbukti bahwa banyak masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan dari desa.

Faktor pendukung yang kedua adalah sumber daya alam yang menjadi pendukung dalam mengaplikasikan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya sumber daya alam yang sangat banyak masyarakat akan semakin gampang dalam melaksanakannya sesuai kemampuannya. Masyarakat juga dapat menggunakan sumber daya alam yang ada dengan cermat dan merawatnya tanpa adanya sampah.⁷¹ Dengan penggunaan sumber daya alam yang efisien mengarahkan masyarakat pada kemandirian dari penyedia sumber daya alam dan nantinya mampu meningkatkan pemberdayaan ekologi dengan pengambilan keputusan secara mandiri.⁷²

Faktor pendukung yang ketiga adalah dukungan dari pemerintah yang sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas dan pihak sponsor yang membantu baik berupa pengadaan pelatihan maupun dana untuk masyarakat. Bantuan yang dilakukan pemerintah atau pihak lain yang sudah memberikan bantuan dapat dipakai dalam kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat. Dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan

⁶⁹Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 304.

⁷⁰Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban", 2.

⁷¹Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 304.

⁷²Pricillia Azhani, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ekowisata Mangrove (Suatu Kajian di Kawasan Hutan Mangrove Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Pantai Timur Surabaya)", 25.

pemerintah atau pihak lainnya dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan ekowisata.⁷³ Pemerintah makin serius berupaya untuk mengeluarkan program-program maupun kebijakan-kebijakan untuk memberdayakan masyarakat.⁷⁴

Menurut Muh Jufri Yusuf dalam jurnal yang ditulis oleh Nisita Prabawati, mengungkapkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat pesisir antara lain yaitu:

- 1) Sosialisasi, masyarakat yang kurang bersosialisasi dan berinteraksi antar masyarakat lain.
- 2) Potensi budidaya perikanan, masyarakat pesisir mempunyai potensi dalam membudidayakan perikanan akan tetapi masyarakat yang belum bisa mengembangkannya.
- 3) Sumber daya manusia, masyarakat pesisir yang masih kurang dalam pengetahuan teknologi yang menjadikan masyarakat menjadi siap akan adanya perubahan.
- 4) Anggaran, belum adanya anggaran yang diturunkan ke masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat.
- 5) Partisipasi masyarakat, yang masih belum bisa kompak dan masih individual.
- 6) Kondisi sarana dan prasarana, yang masih perlu di tata dan di benahi.⁷⁵

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah:

⁷³Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes" 304.

⁷⁴Wiwik dan M. Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai di Kabupaten Tuban", 2.

⁷⁵Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Brebes", 304.

1. Judul penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah oleh Nisita Prabawati (13102241010) menjelaskan pemberdayaan masyarakat pesisir bertujuan untuk menjadikan masyarakat pesisir agar lebih berkembang dan mandiri serta tidak bergantung pada orang lain, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kaliwlingi, untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan terjali kerjasama, untuk meningkatkan wawasan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas dalam melakukan kegiatan.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wilayah pesisir berbasis ekowisata bahari memberikan dampak pada masyarakat menjadikan lebih berkembang, mandiri, dan mampu mengembangkan perekonomian desa dan menciptakan ketentraman masyarakat Desa Kaliwlingi. Tidak hanya itu saja, masyarakat mampu memajukan keterampilan yang didapatkan dengan memproduksi berbagai macam produk yang menggunakan sumber daya alam di wilayah pesisir dan masyarakat juga mampu berperan aktif dalam mengembangkan dan pelayanan di tempat wisata.⁷⁶

2. Judul penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul oleh Nur Rika Puspita Sari (08102241009) menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan pariwisata sebagai usaha pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan kontribusi berupa perubahan-perubahan yang ada di desa, untuk mengembangkan organisasi kelompok sadar Wisata Dewabejo dan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan dalam aspek sosial, kultural dan ekonomi yang ada di desa.

⁷⁶Nisita Prabawati, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Wilayah Pesisir Berbasis Ekowisata Bahari di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes" *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta (2018).

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa dari sisi pengembangan kelembagaan berawal dari perencanaan yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata, dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata berawal dari perencanaan masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki masyarakat dan dari sisi pengembangan sarana prasarana dalam pelaksanaannya perlu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan pengusaha atau pihak swasta.⁷⁷

3. Judul penelitian: Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai oleh Jumriati (90300114113) menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, untuk menjadi daya tarik tersendiri dalam menjadikan wisata dan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat agar sadar akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian demi keberlangsungan hidup masyarakat pesisir.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah yang berperan besar dalam pengelolaan, menjaga dan melestarikan hutan mangrove gunanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, perencanaan dalam mengelola hutan mangrove sudah sejalan atau berjalan dengan baik dengan terlibatnya baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakatnya ikut berpartisipasi dan sadar akan pelestarian kawasan hutan mangrove, dan meningkatnya perekonomian masyarakat

⁷⁷Nur Rika Puspita Sari, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Obyek Wisata oleh Kelompok Sadar Wisata Dewabejo di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul" *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta (2012).

lokal dengan adanya daya tarik tersendiri untuk menjadikan wisata.⁷⁸

4. Judul penelitian: Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan oleh Lediana Apriyani (1341020095) menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membantu mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pengembangan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentaskan kemiskinan, untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kepedulian partisipasi sosial warga masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa, untuk mendorong dan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat lokal, untuk mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, untuk mengembangkan jaringan kerja antar lembaga pemberdayaan masyarakat agar terjalin kerjasama dan keterpaduan antar program pemenuhan kebutuhan dasar, dan untuk mengembangkai pusat informasi agar tersebar luas di Indonesia adanya wisata di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat Desa Kunjir sudah berkembang dan maju dengan kondisi dan aktivitas sehari-hari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, secara keseluruhan masyarakatnya yang sudah banyak memiliki usaha yang dimiliki dan ditekuni oleh masyarakat mulai dari kelontongan sampai usaha rumahan, pariwisata yang berkembang melalui cara pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki Desa Kunjir, dan meningkatnya perekonomian desa dan meningkatnya pendapatan warga baik itu pengusaha makanan, jasa sewaan, homestay, pemilik kapal, tour

⁷⁸Jumriati, "Dampak Ekonomi Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove Melalui Pemberdayaan Masyarakat: Studi Usaha Kepiting Bakau Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

guide dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan promosi wisata.⁷⁹

5. Judul penelitian: Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturraden oleh Rimas Martiarini (1323203084) menjelaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan Desa Wisata Ketenger agar dapat menarik perhatian para wisatawan, untuk membangkitkan semangat masyarakat dalam memberdayakan kehidupan menuju kesejahteraan, dan untuk menciptakan perekonomian kreatif, penyajian kuliner yang inovatif, produk dan jasa yang berspektif ekonomi Islam yang bertujuan untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam.

Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya Pokdarwis yang sudah cukup lama dapat mengembangkan Desa Ketenger agar dapat menarik wisatawan berkunjung, atas partisipasi dari masyarakat dan terbentuknya kerjasama antara kelompok organisasi, pemerintah dan pengusaha, pemerintah dan Pokdarwis dalam mengadakan pelatihan-pelatihan, dan meningkatnya perekonomian masyarakat yang berspektif ekonomi Islam namun dari segi produk, jasa, obyek dan tujuan pariwisata pada umumnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika Islam.⁸⁰

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas adalah sama-sama mendeskripsikan dan menjelaskan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian desa, sama-sama masyarakatnya ikut berperan sangat aktif dan berpartisipasi, dan sama-sama menyadarkan masyarakat akan pentingnya melestarikan lingkungan untuk dimanfaatkan sumber daya alamnya dalam pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yang

⁷⁹Lidiana Apriyani, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal di Desa Wisata Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan (2019).

⁸⁰Rimas Martiarini, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Ketenger Baturraden" *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2017).

dijelaskan diatas adalah dalam bentuk pembuatan program desa ada yang ekowisata bahari, obyek wisata, melalui usaha dan desa wisata dalam pemberdayaan masyarakat dan lokasi yang diteliti berbeda, sedangkan saya meneliti pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata mangrove.

C. Kerangka Berfikir

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan ekowisata mangrove menjadi solusi yang tepat pada daerah pesisir yang tanahnya berupa lumpur. Apalagi sekarang perubahan atau kerusakan yang menimpa daerah pesisir dapat dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan masyarakat yang prosesnya alamiah, yang terdapat dilahan atas maupun lahan bawah. Maka dari itu, menanam mangrove di kawasan pesisir pantai sangat bermanfaat untuk meminimalisir dampak buruk yang lebih besar lagi terhadap tekanan sumber daya alam mangrove, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melauai pengembangan ekowisata mangrove.

Adanya program penanaman pohon mangrove membuat masyarakat tahu akan pentingnya melestarikan lingkungan dan mengurangi terjadinya abrasi atau meluapnya air laut kedaratan. Setelah pohon mangrove sudah agak tinggi dijadikan sebagai ekowisata. Tidak hanya untuk berwisata saja akan tetapi, kegunaan pohon mangrove sangatlah banyak yaitu dapat melindungi lingkungan, mengendalikan dari abrasi dan mencegah intrusi air laut. Selain itu juga, dengan adanya pohon mangrove, masyarakat harus membuat kreatif mungkin untuk mengembangkan ekowisata mangrove agar dikenal oleh banyak orang. Maka dari itu, di adakan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat semangat dalam mengembangkan ekowisata. Dalam pengembangan ekowisata pasti ada faktor pendukung, faktor penghambat dan dampak-dampak setelah adanya program ekowisata.

Faktor pendukung yaitu munculnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, mendukung adanya sumber daya alam dan dukungan dari pemerintah. Sementara, faktor penghambat yaitu sumber daya manusia, karakteristik dalam berpendapat, dan pemahaman masyarakatnya masih rendah.

Sehingga menjadi pengambat akan tetapi masih bisa diperbaiki agar menjadi lebih maju. Dampak yang diperoleh setelah adanya program pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekowisata berjalan sesuai perencanaan akan berpengaruh positif dalam perekonomian desa dan terjaganya ekologi lingkungan di wilayah pohon mangrove.

Dari uraian diatas dapat dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:

